

**PENGUATAN KEMAMPUAN PERTAHANAN NIRMILITER DI PROVINSI BALI
DALAM MENGHADAPI ANCAMAN VIRUS COVID-19 GUNA MENINGKATKAN
PERTAHANAN NEGARA**

Oleh

**Ketut Budiantara¹⁾, Ikhwan Syahtaria²⁾, Dohar Siantur³⁾, Lukman Yudho Prakoso⁴⁾,
Herlina Juni Risma Saragih⁵⁾, Ernalem Bangun⁶⁾**

**^{1,2,3,4,5,6}Universitas Pertahanan RI, Kawasan IPSC Sentul, Sukahati, Kec. Citeureup,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810**

Email: [1kamalekumdeplek@gmail.com](mailto:kamalekumdeplek@gmail.com)

Abstrak

Pentingnya penguatan kemampuan pertahanan nirmiliter di provinsi Bali sebagai dampak dari ancaman virus Covid-19 dilatarbelakangi oleh pentingnya menjaga pertahanan negara dari berbagai ancaman nirmiliter, seperti ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, terorisme, Narkoba dan keselamatan umum seperti penyebaran virus Covid-19. Penyebaran pandemi Covid-19 di provinsi Bali masih tinggi dimana per tanggal 9 Juni 2021 tercapat bahwa jumlah kasus kumulatif sebanyak 47.581 orang, sembuh 45.630 orang (95,90%), dan meninggal 1.514 orang (3,18%), kasus aktif sebanyak 437 orang (0,92%), dengan jumlah terbanyak penderita pada Kota Denpasar dengan akumulasi sebanyak 15.032 penderita. Penyebaran virus Covid-19 di Bali telah menurunkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat pada aspek wisata. Dari kondisi tersebut dapat disusun pertanyaan tentang bagaimana tingkat kemampuan Pertahanan nirmiliter untuk menghadapi ancaman virus Covid-19, prioritas alternative dan strategi penguatan kemampuan Pertahanan nirmiliter. Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif pada kemampuan Pertahanan nirmiliter pada aspek kebijakan/peraturan (3,6), kewaspadaan dini (3,9), bela negara (3,9), kemampuan teknologi (3,7) dan dukungan anggaran (3,5). Untuk mendukung penguatan kemampuan Pertahanan nirmiliter perlu disusun kebijakan yang tepat dan pembentukan lembaga penanggulangan ancaman nirmiliter. Langkah strategis yang perlu dilakukan adalah peningkatan kemampuan analisis terhadap berbagai potensi ancaman agar dapat memberikan analisis data yang tepat untuk menghadapi berbagai potensi ancaman nirmiliter. Sebagai saran diperlukan aksi pemerintah dalam mendukung peningkatan kewaspadaan nasional untuk mencegah terjadinya risiko dari ancaman nirmiliter.

Kata Kunci: Ancaman Nirmiliter, Pertahanan negara, Covid-19, Bali, Nirmiliter

PENDAHULUAN

Usaha untuk meningkatkan pertahanan negara disipakan guna menghadapi berbagai ancaman termasuk ancaman nirmiliter yang mengganggu pertahanan negara (K. A. Prasetyo, Prakoso, & Sianturi, 2021). Dalam upaya menjaga pertahanan negara, tidak jarang dalam upaya menjaga pertahanan negara, antar negara saling berkompetisi untuk memiliki dominasi guna menjaga pertahanan negara dari berbagai ancaman. Bangsa dalam arti sosiologis antropologis adalah kelompok

masyarakat yang mendiami suatu wilayah dengan diikat oleh kesamaan seperti kesatuan ras, agama/kepercayaan, tradisi, sejarah, daerah, adat istiadat dan bahasa (Hendrizal, 2020). Dari pengertian tersebut pertahanan negara dapat didefinisikan sebagai keselamatan dari seluruh masyarakat yang secara sosiologi dan antropologi memiliki ikatan dalam hal kesatuan ras, agama/kepercayaan, tradisi, sejarah, daerah, adat istiadat dan bahasa (Arto, 2021).

Pada kasus ancaman nirmiliter pandemi Covid-19 di Provinsi Bali yang angka laju pertumbuhan penderita Covid-19 masih tinggi dimana per tanggal 9 Juni 2021 tercapat bahwa jumlah kasus kumulatif sebanyak 47.581 orang, sembuh 45.630 orang (95,90%), dan meninggal 1.514 orang (3,18%), kasus aktif sebanyak 437 orang (0,92%), dengan jumlah terbanyak penderita pada Kota Denpasar dengan akumulasi sebanyak 15.032 penderita (Bali, 9 Juni 2021). Besarnya laju pertumbuhan kasus sebanyak 0,92 persen memberikan implikasi terhadap lambatnya penanganan penyebaran virus Covid-19 yang berdampak pada lambatnya pemulihan dunia usaha pariwisata di Bali yang disebabkan oleh rendahnya jumlah kunjungan wisatawan baik dari domestik maupun luar negeri belum normal. Hal ini juga memberikan dampak pada masih rendahnya pendapatan masyarakat dan pemerintah daerah terutama dari sektor pajak baik pajak perhotelan, sektor pariwisata, sektor hiburan dan sektor makanan (*food and beverage*) masih rendah. Realisasi penerimaan perpajakan Provinsi Bali per 30 Juni 2020 sebesar Rp4,32 triliun, yang didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp3,22 triliun (74,5%) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp1,05 triliun (24,3%). Realisasi tersebut lebih kecil dibandingkan dengan Penerimaan Perpajakan pada periode yang sama tahun 2019 yang mencapai Rp5,22 triliun. Penurunan penerimaan perpajakan tersebut merupakan dampak dari adanya pandemi Covid-19 (Ariwibawa, 2020)

Seperti halnya kejadian wabah Covid 19, pada kondisi tertentu telah salah memprediksi potensi penyakit menular kepada masyarakat. Kurang komprehensifnya analisis terhadap potensi ancaman pandemi Covid 19 tersebut diindikasikan dengan adanya pemikiran bahwa, **pertama** penyakit tersebut kemungkinan kecil dapat menular di negara yang memiliki cuaca panas seperti Indonesia. **Kedua**, sebagian masyarakat juga memiliki pemikiran bahwa warga Indonesia memiliki kekebalan alamiah

karena sering mengonsumsi rempah-rempah, sehingga tidak mudah terjangkit penyakit Covid 19. Sebagai dampak dari kedua pemikiran tersebut, beberapa pengusaha Indonesia masih melakukan kegiatan ekspor dan reekspor peralatan kesehatan seperti masker, alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan dan *hand sanitizer* ke luar negeri. Kondisi ini tentu saja membuat ketiga barang tersebut menjadi langka pada saat presiden mengumumkan akan adanya warga Indonesia yang terjangkit Covid 19 sebagai pasien pertama dan kedua pada tanggal 2 Februari 2020. Dengan kondisi tersebut diperlukan peningkatan kemampuan pertahanan nirmiliter untuk menghadapi ancaman virus Covid-19 (Prakoso, 2020).

Sebagai bahan analisis, penulis menggunakan data sekunder yang didapatkan dari sumber data laporan kebencanaan BNPB, data laporan WHO dan berbagai sumber media massa main stream di tanah air terutama di Provinsi Bali. Penulisan Tesis ini disajikan dengan metode kuantitatif yang didasarkan pada survei dan wawancara dengan narasumber serta dengan data sekunder dan triangulasi dengan partisipan yang terkait dengan peningkatan kemampuan pertahanan nirmiliter di Provinsi Bali dalam menghadapi ancaman virus Covid-19. Dari hasil penelitian diharapkan akan mampu memberikan solusi bagi upaya meningkatkan kemampuan pertahanan nirmiliter di Provinsi Bali dalam menghadapi ancaman virus Covid-19 yang dapat mengganggu pertahanan negara Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif untuk menganalisis berbagai data-data, gejala-gejala, informasi-informasi dan keterangan-keterangan dalam meningkatkan kemampuan pertahanan nirmiliter di Provinsi Bali dalam menghadapi ancaman pandemi Covid-19. Penelitian kuantitatif diartikan sebagai proses analisis

untuk memahami berbagai kondisi yang disusun dengan berbagai kajian teori dan studi literatur dan pengolahan data untuk menghasilkan nilai yang menjadi pendukung data dari fenomena (Creswell, 2017). Metode penelitian kuantitatif ini disusun dengan perumusan berbagai hal terkait data-data, informasi dan keterangan dalam peningkatan peningkatan kemampuan pertahanan nirmiliter di Provinsi Bali dalam menghadapi ancaman virus Covid-19 dilanjutkan dengan melakukan survei terhadap berbagai data yang mendukung terhadap hasil penelitian kuantitatif (Creswell, 2013). Dari data kuantitatif yang didukung dengan kegiatan survei melalui berbagai data dan informasi dan menyusun laporan dari pandangan rinci dari responden (Creswell, 2017).

Pertahanan negara adalah merupakan tujuan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Marcus Tullius Ciero pernah menyampaikan *Salus populi suprema lex* yang artinya bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Dengan demikian dengan berdirinya sebuah bangsa, maka bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat (A. Setiawan, 2018).

Metode AHP digunakan untuk memeringkat alternatif keputusan dan memilih yang terbaik dengan beberapa kriteria. Langkah AHP dilakukan dengan mengembangkan satu nilai numerik untuk memeringkat setiap alternatif keputusan, berdasarkan pada sejauh mana tiap-tiap alternatif memenuhi kriteria pengambil keputusan. Metode AHP sesuai digunakan pada model penelitian pengambilan keputusan (Saaty, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil pengolahan data pada 6 elemen yang terdiri dari: **sektor nasional yang terpengaruh, kendala utama, perubahan yang dimungkinkan, tujuan program peningkatan pertahanan nirmiliter**

menghadapi pandemi Covid-19, **aktivitas yang dibutuhkan dan aktor yang terlibat** dalam pelaksanaan program dapat diuraikan kaitannya dengan kemampuan menghadapi ancaman pandemi Covid-19 dan pertahanan negara di provinsi Bali.

a. Sektor nasional yang terpengaruh.

Dari hasil pengolahan data partisipan pada elemen **sektor yang terpengaruh** dalam penguatan kemampuan pertahanan nirmiliter untuk menghadapi ancaman virus Covid-19, diketahui bahwa sebagai elemen kunci adalah sektor legislasi yang dilakukan dengan penyusunan kebijakan/peraturan perundang-undangan di DPR untuk meningkatkan kekuatan pertahanan nirmiliter. Kegiatan legislasi ini merupakan kegiatan penting untuk menyusun kebijakan/peraturan untuk penguatan kemampuan pertahanan nirmiliter di masyarakat (Robbani, Reksoprodjo, & Bastari, 2020).

Terkait dengan tugas dalam menyiapkan kemampuan pertahanan nirmiliter di daerah saat ini ada pada pemerintah daerah yang didukung dengan kedinasan terkait. Sementara untuk penanggulangan untuk menghadapi potensi ancaman nirmiliter, belum ada lembaga yang bertugas menanganinya, kecuali untuk penanggulangan bencana, di daerah terdapat institusi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan BNPB pada tingkat pusat. Sementara pada aspek potensi ancaman nirmiliter pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, terorisme, Narkoba dan keselamatan umum belum ada organisasi/lembaga yang menanganinya. Dengan kondisi tersebut penting untuk melakukan reorganisasi BNPB menjadi lembaga BNPAN yang memiliki tugas untuk melakukan penanggulangan terhadap munculnya ancaman nirmiliter (Lukman Yudho Prakoso, 2021).

Pada saat ancaman nirmiliter tersebut masih pada tataran potensi, maka lembaga BNPAN dapat meningkatkan kemampuan

pertahanan negara aspek nirmiliter dengan melakukan kegiatan pembinaan untuk meningkatkan kewaspadaan dini aparaturnya pemerintah daerah dan masyarakat agar memiliki kemampuan untuk melakukan tekesi dini. Dengan kemampuan analisis dan deteksi dini terhadap potensi ancaman nirmiliter, maka aparaturnya pemerintah daerah bersama masyarakat akan mampu melakukan pencegahan dan mitigasi terhadap ancaman nirmiliter tersebut. Untuk mendukung kemampuan aparaturnya pemerintah daerah dalam mencegah terjadinya ancaman nirmiliter perlu juga dilakukan peningkatan keterpaduan antara institusi terkait dari berbagai bidang ancaman nirmiliter (Subagyo, 2018). Untuk meningkatkan keterpaduan tersebut diperlukan suatu sarana teknologi dan juga penguasaan teknologi dan informasi (TIK) yang mengintegrasikan suatu informasi dari daerah ke pusat, sehingga akan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang tepat dalam penanggulangan ancaman nirmiliter seperti pandemi Covid-19.

b. Kendala Utama

Dari hasil pengolahan data partisipan pada elemen **kendala utama** penguatan kemampuan pertahanan nirmiliter untuk menghadapi ancaman virus Covid-19 adalah rendahnya kemampuan analisis aparaturnya pada potensi ancaman nirmiliter merupakan elemen kunci, sehingga aparaturnya pemerintah dan juga pemerintah daerah perlu ditingkatkan agar mampu memberikan informasi yang tepat dan akurat terkait dengan fenomena-fenomena yang terjadi yang dapat mengganggu keselamatan bangsa dan Pertahanan negara seperti ancaman virus Covid-19. Adanya kondisi akan rendahnya kemampuan analisis aparaturnya pemerintah dan pemerintah daerah dalam menganalisa berbagai potensi ancaman nirmiliter termasuk dampak pandemi Covid-19 telah memberikan dampak kurang sinkronnya kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, sehingga penanganan

pandemi Covid-19 membutuhkan waktu yang lama (Amryudin & Katharina, 2020).

Dengan demikian untuk mampu meningkatkan kemampuan aparaturnya pemerintah dan pemerintah daerah dalam penguatan kemampuan Pertahanan negara aspek nirmiliter untuk menghadapi virus Covid-19 diperlukan peningkatan kemampuan analisa terhadap berbagai fenomena yang terjadi (Dipua, 2020). Kemampuan analisis ini juga perlu disiapkan dengan dukungan koordinasi dengan institusi terkait baik di daerah maupun di pusat melalui media, sarana dan kemampuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dengan keterpaduan antara aparaturnya pemerintah dan pemerintah di daerah diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat sampai pada tataran desa/kampung untuk mematuhi segala instruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah (Herdiana, 2020).

Peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk mematuhi kebijakan/peraturan pemerintah dan pemerintah daerah serta keamanan lingkungan sekitarnya akan mampu mendukung kemampuan dalam menghadapi berbagai potensi ancaman nirmiliter termasuk di antaranya pandemi Covid-19.

c. Perubahan yang perlu dilakukan

Hasil pengolahan data partisipan pada elemen **perubahan yang perlu dilakukan** dalam penguatan kemampuan pertahanan nirmiliter untuk menghadapi ancaman virus Covid-19 di provinsi Bali, sebagai kunci keberhasilan pentingnya kegiatan restrukturisasi organisasi BNPB menjadi Badan Nasional Penanggulangan Ancaman Nirmiliter (BNPAN). Seperti yang telah diuraikan di sub-bab sebelumnya bahwa organisasi BNPAN ini merupakan *elaborative* dari BNPB yang disiapkan untuk memperbesar cakupan bidang dan tanggung jawab dalam penanggulangan ancaman nirmiliter.

Pentingnya penyusunan organisasi BNPAN ini didasarkan pada pertimbangan

bahwa potensi ancaman terhadap keselamatan bangsa dapat berupa banyak bentuk dan aspek. Pada aspek ancaman nirmiliter ini dapat berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, legislasi, Narkoba, siber dan keselamatan umum seperti pandemi Covid-19. Dengan kondisi tersebut diperlukan suatu institusi yang mampu memberikan informasi untuk melakukan deteksi dini, berikutnya diikuti dengan peringatan dini (Early Warning) dan pencegahan dini (Nizar, 2021). Apabila potensi ancaman nirmiliter tersebut, tidak dapat dihindarkan dan tetap terjadi di wilayah Indonesia atau lebih spesifik di provinsi Bali, maka BN PAN diharapkan mampu mengambil langkah yang mampu untuk mendukung penanggulangan ancaman nirmiliter (Kasih Prihantoro, 2021).

Untuk mendukung perubahan organisasi BN PB menjadi yang menangani ancaman nirmiliter di perlukan perubahan tata kelola kelembagaan terhadap ancaman nirmiliter. Dengan perubahan organisasi ini diperlukan penyusunan visi dan misi organisasi untuk meningkatkan efektifitas dalam penanggulangan ancaman nirmiliter. Disamping juga diperlukan berbagai strategi dan mekanisme kerjasama dengan kementerian/Lembaga terkait baik pada tingkat pusat dan daerah untuk menghadapi berbagai ancaman nirmiliter.

d. Tujuan Program.

Hasil pengolahan data partisipan pada elemen **tujuan program peningkatan kemampuan pertahanan Nirmiliter** diketahui bahwa sebagai elemen kunci meningkatkan kemampuan seluruh bangsa Indonesia untuk menghadapi ancaman nirmiliter. Pentingnya peningkatan kemampuan masyarakat Indonesia dalam mendeteksi dini, mencegah dini dan penanggulangan terhadap potensi ancaman nirmiliter adalah adanya kondisi dimana, berkembangnya ancaman nirmiliter seperti virus Covid-19 akan berdampak pada melemahnya sistem pertahanan negara.

Sebagai dampak dari penyebaran pandemi Covid-19 yang telah diikuti dengan

berbagai kebijakan pemerintah dalam upaya memutus rantai penyebaran seperti kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Era Kenormalan Baru (*New Normal*) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah memberikan berbagai dampak negatif seperti menurunnya hubungan sosial di masyarakat, sehingga berdampak pada penurunan produksi, meningkatnya angka pengangguran, menurunnya pendapatan masyarakat dan menurunnya pertumbuhan ekonomi nasional (Prihantoro, 2021).

Untuk meningkatkan sistem pertahanan negara pada aspek ancaman nirmiliter, maka pemerintah perlu untuk menyusun berbagai program kebijakan dengan sasaran untuk meningkatkan kemampuan pertahanan nirmiliter yang diharapkan memiliki dampak menjaga stabilitas perekonomian nasional yang dilakukan dengan meningkatkan kemampuan analisa terhadap berbagai ancaman nirmiliter aparat pemerintah daerah dan masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi ancaman nirmiliter, meningkatkan keterpaduan antara seluruh personil di kementerian/lembaga untuk menghadapi berbagai potensi ancaman nirmiliter, memitigasi berbagai risiko ancaman nirmiliter, mempercepat pemulihan masyarakat terdampak pasca terjadinya ancaman dan meningkatkan kesiapan masyarakat untuk menghadapi ancaman nirmiliter.

e. Aktifitas yang dibutuhkan

Hasil pengolahan data partisipan pada elemen **aktivitas yang dibutuhkan** dalam penguatan kemampuan pertahanan nirmiliter untuk menghadapi ancaman virus Covid-19, sebagai elemen kunci adalah pentingnya kegiatan pendidikan kemampuan analisis potensi ancaman nirmiliter dan Revisi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Peningkatan kemampuan analisis aparat pemerintah dan pemerintah daerah dalam mendeteksi dini terhadap berbagai potensi ancaman nirmiliter

akan memberikan dampak terhadap ketepatan dan keakuratan data, sehingga kebijakan dan keputusan yang diambil akan memiliki efektifitas dalam penanggulangan ancaman nirmiliter termasuk penyebaran pandemi Covid-19. Kemampuan aparat pemerintah dan komponen pendukung seperti personil TNI dan Polri akan memberikan kontribusi dalam meminimalisir potensi risiko terjadinya dampak negatif yang lebih besar.

Sedangkan dalam revisi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana perlu dilakukan revisi untuk menghadapi berbagai potensi ancaman terhadap keselamatan bangsa. Revisi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Dalam penanggulangan berbagai bencana perlu dilakukan beberapa revisi seperti harmonisasi dalam penanggulangan wabah penyakit menular yang diatur dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 dan bencana adanya konflik sosial yang telah diatur dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012, maka adanya revisi dan harmonisasi akan mampu mendukung efektifitas dalam melakukan penanggulangan terhadap potensi ancaman terhadap keselamat bangsa.

Penyelenggaraan penanggulangan berbagai potensi ancaman terhadap keselamatan bangsa dapat dilakukan dengan kegiatan penetapan berbagai kebijakan pembangunan yang berdampak timbulnya bencana, berbagai kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan juga rehabilitasi. Dengan adanya penyebaran pandemi Covid-19 yang dapat mengganggu keselamatan bangsa Indonesia, maka diperlukan tata kelola dalam meningkatkan kewaspadaan di di provinsi Bali agar mampu menangani bahaya pandemi Covid-19 sebagai bagian dari ancaman nirmiliter yang dapat mengganggu keselamatan bangsa.

f. Aktor yang terlibat

Hasil pengolahan data partisipan pada elemen **aktor yang terlibat** dalam penguatan

kemampuan pertahanan nirmiliter untuk menghadapi ancaman virus Covid-19, sebagai elemen kunci adalah pentingnya lembaga Badan Intelijen Negara (BIN) untuk memberikan analisis yang tepat dan akurat kepada Presiden, sehingga Presiden mampu mengambil kebijakan dan langkah strategis yang tepat sesuai dengan besarnya risiko yang ditimbulkan dari ancaman nirmiliter tersebut (Suhirwan, 2020).

Peran organisasi BIN dalam memberikan data, fakta, dampak risiko yang didasarkan pada berbagai fenomena dan gejala yang terjadi sebelumnya pada tingkat global, regional dan nasional menjadi acuan dalam menyusun laporan akan terjadinya potensi ancaman yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan seluruh bangsa Indoensia. Dengan data dan informasi yang lengkap, tepat dan akurat akan dapat digunakan oleh Presiden untuk memberikan arahan dan kebijakan yang tapat yang akan dijalankan oleh seluruh elemen Kementerian/lembaga terkait secara tepat sasaran, sehingga bangsa Indonesia dapat memitigasi atau bahkan mampu mencegah terjadinya ancaman nyata yang dapat mengganggu keselamatan masyarakat dan keamanan nasional.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dapat disusun suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kemampuan Pertahanan nirmiliter dalam menghadapi ancaman virus Covid-19 di provinsi Bali yang diukur dari lima variabel antara lain: Kebijakan/peratu

ran dengan nilai rata-rata 3,6; Kewaspadaan dini dengan nilai rata-rata 3,9; Bela negara dengan nilai rata-rata 3,9; Kemampuan teknologi dengan nilai rata-rata 3,7 dan Dukungan anggaran dengan nilai rata-rata 3,5, bila dianalisis dengan menggunakan Anova satu arah (*One Way Anova*), dengan hasil perhitungan bahwa $F_{hitung} = 8,8786$ dan $F_{tabel} = 2,5572$, maka $F_{hitung} \geq$ dari F_{tabel} , artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata sub-variabel dalam menguatkan kemampuan Pertahanan nirmiliter untuk menghadapi ancaman virus Covid-19. Dengan melihat nilai dukungan anggaran terhadap penguatan

kemampuan nirmiliter di provinsi Bali dalam menghadapi ancaman virus Covid-19 sebesar 3,5; maka diperlukan peran pemerintah daerah dalam mendukung industri wisata yang sangat terdampak sebagai pengaruh penurunan jumlah dan aktifitas wisata.

2. Untuk mewujudkan penguatan kemampuan Pertahanan nirmiliter untuk menghadapi ancaman virus Covid-19 di provinsi Bali terhadap peningkatan Pertahanan negara diperlukan berbagai langkah prioritas yang meliputi: penyusunan kebijakan/peraturan yang tepat untuk mendukung penguatan kemampuan pertahanan

nirmiliter, membentuk lembaga untuk menangani penguatan kemampuan pertahanan nirmiliter, meningkatkan kemampuan analisis aparatur pemerintah pada potensi ancaman nirmiliter, meningkatkan pengetahuan aparatur pemerintah untuk meningkatkan kekuatan nirmiliter, mengintegrasikan kegiatan pelatihan untuk mendeteksi dini terhadap ancaman nirmiliter dan mewujudkan dukungan anggaran yang efektif untuk memberikan perawatan, pemeriksaan (*Testing*) dan pelacakan (*Tracking*) bagi korban Covid-19 serta dukungan anggaran untuk pengadaan alat pelindung diri (APD), obat-obatan dan

peralatan yang digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19. Dukungan anggaran yang tepat sasaran kepada masyarakat terdampak akan memberikan efektifitas dalam mencegah penyabran pandemic Covid-19 di provinsi Bali.

3. Langkah strategis yang diperlukan untuk mendukung penguatan kemampuan Pertahanan nirmiliter dalam menghadapi ancaman virus Covid-19 di provinsi Bali dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan kunci dengan menrencanakan legislasi bagi pengambilan kebijakan/peraturan untuk mendukung penguatan kemampuan Pertahanan nirmiliter, meningkatkan kemampuan aparatur

pemerintah dalam melakukan analisis fenomena dan gejala yang dapat mengganggu keselamatan bangsa, melakukan restrukturisasi lembaga BNPB agar memiliki cakupan bidang tugas dalam menanggulangi berbagai ancaman nirmiliter dan meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat akan Pertahanan nirmiliter. Kegiatan untuk meningkatkan keakuratan dan ketepatan hasil analisis akan berbagai ancaman terhadap keselamatan bangsa oleh BIN, akan memberikan kontribusi bagi pemerintah agar mampu mengambil kebijakan yang tepat untuk memitigasi dan mencegah terjadinya risiko

bagi keselamatan dan keamanan nasional.

Daftar Pustaka:

- [1] Amrynudin, Anin Dhita Kiky, & Katharina, Riris. (2020). Birokrasi Dan Kebijakan Percepatan Penanganan Covid-19. *Info Singkat*, 12(9), 25-30.
- [2] Ariwibawa, Benedictus Didik. (2020). *Kajian Fiskal Regional Triwulan II 2020*. Bali.
- [3] Arto, R. S., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2021). Strategi Pertahanan Laut Indonesia dalam Perspektif Maritim Menghadapi Globalisasi. *Strategi Pertahanan Laut*, 5(2), 65–86.
- [4] Creswell, John W. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*: Sage publications.
- [5] Dipua, A., Hermawan, R., Puspitawati, D., Harahap, N., Rizanny, D., Prakoso, L. Y. Y., Nurdiansyah, & Prakoso, L. Y. Y. (2020). An Analysis of The South China Sea Conflict: Indonesia's Perspectives, Contexts and Recommendations. *PJAE*, 17(4), 976–990.
- [6] Hendrizal. (2020). Mengulas Identitas Nasional Bangsa Indonesia Terkini. *Pelita Bangsa Pelestari Pancasila*, 15(1), 1-21.
- [7] Herdiana, Dian. (2020). Pengawasan kolaboratif dalam pelaksanaan kebijakan bantuan sosial terdampak covid-19. *Jdp (jurnal dinamika pemerintahan)*, 3(2), 85-99.
- [8] Kasih Prihantoro Zakariya, Lukman Yudho Prakoso, Ratna Damayanti, A. D. (2019). Public Policy Analysis of Defense Areas and Defense Area Plan In Grati Pasuruan. *The 3th Indonesia International Defense Science Seminar*, 2(Universitas Pertahanan), 483–490.
- [9] Kasih Prihantoro, L. Y. P. (2021). *BELA NEGARA, PERPEKTIF TEKNOLOGI*

- PERTAHANAN. ID Patent
 EC00,202,155,036.
- [10] Lukman Yudho Prakoso Kasih Prihantoro, S., & editor Suca Rusdian, M. K. (2021). *Metode SWOT AHP dalam merencanakan strategi pertahanan [sumber elektronik]*.
- [11] Lukman Yudho Prakoso, Suhirwan, Kasih Prihantoro, Asep Iwa Soemantri- Editor: Budi Pramono, R. (2021). *Bahan Ajar Kebijakan Pertahanan Laut* (R. Budi Pramono (Ed.); 1st ed.). Unhan Press.
- [12] Nizar, A. A., Pramono, B., Gunawan, R., & Prakoso, L. Y. (2021). Handling Social Conflicts in The Context of A Military Campaign Strategy (Study in The Working Area of The Balik Papan Police Resort). *International Journal of Social Science And Human Research*, 04(05), 1205–1209. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v4-i5-40>
- [13] Prakoso, L. Y. suhirwan; rianto; tri legionosuko; G. Z. (2021). Analysis Public Policy Of Defence Strategy. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, August. <https://www.abacademies.org/articles/analysis-public-policy-of-defence-strategy.pdf>
- [14] Prasetyo, Kuncoro Arry, Prakoso, Lukman Yudho, & Sianturi, Dohar. (2021). Strategi Pertahanan Laut Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Keamanan Maritim. *Strategi Pertahanan Laut*, 5(1).
- [15] Prasetyo, Kuncoro Arry, Prakoso, Lukman Yudho, & Sianturi, Dohar. (2021). Strategi Pertahanan Laut Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Keamanan Maritim. *Strategi Pertahanan Laut*, 5(1).
- [16] Prihantoro, K., Suhirwan, A. I. S., Pramono, B., Saputro, G. E., & Rianto, L. Y. (n.d.). *Tourism Village Government Program, Characterized By State Defense as the Economic Foundation of National Defense*.
- [17] Robbani, Khalid S, Reksoprodjo, Agus HS, & Bastari, Bastari. (2020). PERLINDUNGAN INFRASTRUKTUR INFORMASI KRITIKAL NASIONAL
- SEKTOR KETENAGALISTRIKAN DARI ANCAMAN SIBER. *Peperangan Asimetris*, 6(1).
- [18] Saaty, Thomas L. (2008). Decision making with the analytic hierarchy process. *International journal of services sciences*, 1(1), 83-98.
- [19] Setiawan, Adam. (2018). Terlupakannya asas keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. <https://metrojambi.com/read/2018/12/13/38164/terlupakannya-asas-keselamatan-rakyat-adalah-hukum-tertinggi/>
- [20] Subagyo, Agus. (2018). Sinergi Dalam Menghadapi Ancaman Cyber Warfare. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 5(1), 89-108.
- [21] Suhirwan Adryan Ole, Cecep Kurniawan, L. Y. P. (2020). Indonesian Navy Against Covid-19. *Public Policy And Administration Research*, 10(IISTE), 18–23